

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILU OLEH
KPUD KOTA PADANG PADA PEMILU LEGISLATIF
DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2009**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

YUSYAKH GUSTA
BP : 05193055



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

Yusyakh Gusta, 05 193 055, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2010. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Oleh KPUD Kota Padang Pada Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Tahun 2009. Halaman i-xi, 104. Referensi 2 Skripsi, 14 Buku, 2 Jurnal, 5 Undang-undang dan 9 website.

Pemilu legislatif tahun 2009 telah berlangsung pada tanggal 9 April 2009. Pemilu kali ini dilaksanakan dengan beberapa teknis baru yang salah satunya menyangkut tata cara pemberian suara. Sejumlah fenomena menarik juga terjadi setelah pelaksanaan pemilu tersebut, salah satunya adalah permasalahan menyangkut rendahnya partisipasi masyarakat yang terjadi di kota Padang. Salah satu indikator yang patut diperhatikan sehubungan dengan masalah tersebut adalah menyangkut pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan KPUD Kota Padang pada pemilu legislatif tahun 2009. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif dan mendeskripsikan bentuk langkah-langkah yang dilakukan KPUD Kota Padang pada Pilpres tahun 2009 setelah menurunnya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun 2009. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar permasalahan menyangkut rendahnya partisipasi pemilih atau suara sah dalam pemilu dapat dipecahkan melalui proses sosialisasi yang baik.

Pencarian data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengambilan data adalah dengan teknik wawancara dan juga analisis terhadap literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan sifatnya mendalam dan tidak terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu anggota KPUD Kota Padang dan informan pelengkap dari masyarakat pemilih, media massa dan LSM yang dipilih secara purposive sampling.

Dari hasil penelitian didapat bahwa KPUD Kota Padang melakukan sosialisasi pemilu legislatif melalui metode tatap muka, melalui alat bantu dan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. KPUD juga memanfaatkan agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, kelompok pekerja dan media massa. Pola komunikasi yang dibangun ketika melakukan sosialisasi adalah komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Padang kurang efektif karena minimnya dana, waktu yang sempit serta kurangnya kordinasi dan perencanaan di lingkungan internal dan eksternal KPUD. Pada Pilpres Tahun 2009, KPUD Kota Padang tetap melakukan metode sosialisasi yang sama dengan pemilu legislatif sebelumnya dengan lebih meningkatkan frekuensi kegiatan. Hal ini disebabkan oleh informasi Pilpres 2009 lebih sederhana dibandingkan pemilu sebelumnya.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pemilu, KPUD, Pemilu Legislatif Tahun 2009, Pemilu Presiden Tahun 2009.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dipengaruhi secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas demi tercapainya kedaulatan rakyat itu sendiri.¹ Dalam teori demokrasi prosedural yang dikemukakan Joseph Schumpeter, salah satu syarat sistem demokrasi adalah menekankan kepada adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sehingga tidak ada kelompok yang dikecualikan. Schumpeter memfokuskan pada pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum, dimana setiap orang dapat mengaksesnya karena mempunyai kedudukan yang sama dalam hak politik².

Pelaksanaan pemilu dianggap sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hal 53.

² Toni Andrianus Pito, Efriza dan Komal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung, 2006, Hal 295.

undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.³

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi telah menyelenggarakan pemilu sebanyak delapan kali dari tahun 1955 sampai tahun 1999. Dinamika pemilu di Indonesia sebelum era reformasi tersebut telah dihiasi oleh sejumlah perubahan-perubahan sistem yang bertujuan untuk mencapai hasil pemilu yang benar-benar demokratis.⁴

³ Ibid Hal 298

⁴ <http://vivanews.com/> diakses pada tanggal 28 May 2009. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Pemilu kali ini diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Sedangkan 43.104.464 pemilih berpartisipasi melalui 16 daerah pemilihan. Partai Nasional Indonesia (PNI) keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 8.434.653 suara untuk Parlemen dan 9.070.218 untuk Konstituante. Kemenangan PNI disusul oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemilu pertama kali tersebut berlangsung lancar, jujur, adil dan demokratis serta mengundang pujian dari pihak asing. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu yang waktu itu berasal dari pemerintah dan wakil-wakil partai politik. Besarnya minat masyarakat untuk ikut serta merupakan hasil dari sosialisasi yang maksimal. Tercatat hanya 8,59 % pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Panitia secara efektif melakukan pelatihan pemungutan suara di seluruh wilayah pemilihan. Penduduk juga diajak terlibat aktif di dalam persiapan kegiatan pemilu. Mereka diperkenalkan dengan tanda gambar dan cara menyoblos kertas suara sehingga minimnya kesulitan dalam pemberian suara.

Setelah pemilu pertama, perubahan terus terjadi. Salah satu contoh perubahan yang penting adalah pelaksanaan Pemilu dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu dan teratur yaitu 5 tahun sekali, dimulai dari Pemilu kedua tahun 1971 yang disusul dengan Pemilu ketiga tahun 1977. Perubahan lain sejak Pemilu 1977 hingga 1997 atau selama 5 kali pelaksanaan Pemilu, pesertanya menjadi berkurang, yaitu dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah dengan DPR menyederhanakan jumlah partai melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia atau (PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar.

Ketika Reformasi bergulir dan Bacharuddin Jusuf Habibie duduk dikursi Presiden pada tahun 1998, pada tahun itu juga dilaksanakan pemilu yang dipercepat untuk menggantikan hasil-hasil pemilu 1997. Pemilu tersebut dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pemilu kali ini dilaksanakan untuk memperoleh kembali pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu

Perubahan yang signifikan terjadi pada pemilu tahun 2004 yang merupakan masa transisi Era Orde Baru kepada Era Reformasi dimana selain memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota, pemilu saat itu juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pada masa peralihan antara pemilu tahun 1999 kepada pemilu tahun 2004, telah terjadi permasalahan menyangkut kualitas pemilu itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi mengenai sistem baru pemilu kepada masyarakat dinilai tidak efektif dan maksimal. Padahal proses pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

KPU merupakan lembaga yang sering didemo dan diprotes oleh mahasiswa, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan partai politik akibat kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat. Tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui proses dan mekanisme pemilu itu sendiri. Para pemilih merasa bingung karena minimnya pengetahuan mereka tentang teknis cara menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu banyak pula masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

1997 sudah dianggap tidak bisa dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilu tahun 1999 diikuti 48 parpol. Pemilu kali ini dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lalu disusul Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses sosialisasi dalam pemilu memiliki peranan penting untuk membentuk persepsi dan reaksi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Proses sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai informasi seputar pemilu sehingga akan berdampak positif terhadap partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam sosialisasi ini terjadi proses komunikasi antara masyarakat yang telah mempunyai hak pilih dengan KPUD Kota Padang sebagai lembaga yang melakukan proses sosialisasi.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2009, KPUD Kota Padang melakukan rapat pleno untuk membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009. Kelompok kerja ini terdiri dari anggota dan pegawai sekretariat KPUD Kota Padang. Selain penetapan anggota kelompok kerja sosialisasi, juga di tetapkan pembagian tugas dan kewajiban masing-masing anggota.

Selain menetapkan kelompok kerja sosialisasi, di dalam rapat pleno KPUD Kota Padang juga menyusun Tujuan, Target, Sasaran, Materi dan Metode kegiatan sosialisasi Pemilu Legislatif. Dalam penyusunan ini, KPUD Kota Padang berpedoman kepada Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 mengenai Pedoman

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan berpedoman kepada peraturan tersebut, KPUD Kota Padang menyusun tujuan, target, sasaran, materi dan metode kegiatan sosialisasi sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya, yaitu Kota Padang. Perumusan ini dilakukan agar KPUD Kota Padang dapat mewujudkan dan mengefektifkan fungsi serta perannya sebagai lembaga pelaksana sosialisasi pemilu legislatif.

Pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang adalah dengan memanfaatkan 3 metode yaitu (1) Metode tatap muka (2) Metode alat bantu (3) Metode kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Metode-metode ini digunakan agar sosialisasi yang dilakukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Padang telah memanfaatkan sebagian besar agen-agen sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh Michael Rush dan Philip Althoff yaitu keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, kelompok kerja dan media massa. Melalui saluran sosialisasi itulah KPUD Kota Padang melakukan sosialisasi yang tergolong kepada pendidikan politik, dimana KPUD melakukan suatu proses penanaman nilai-nilai politik secara sengaja kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajiban politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi dan Metodologi

- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Cangara, Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- CarltonClymer Rodee dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harun, H. Rochajat, Sumarno AP. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Mandar Maju.
- Imawan, Riswandha. 2004. *Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada.
- Maran, Rafael Raga. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta
- Mas'ood Mohtar dan Andrew Mac Colin. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pito, Toni Andrianus, Efriza dan Fasyah Komal. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung : Nuansa.
- Plano, Jack. 1989. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : CV Rajawali Pers
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Laporan Studi Lapangan Departemen Komunikasi dan Informatika. *Golput, mengapa terus meningkat?*. Edisi 4 Desember 2008 Jurnal Dialog Kebijakan Publik
- Manurung, Hendra. 2009. *Kebudayaan dan Pemilu 2009, Opini pada Departemen Pertahanan RI*, (Online), <http://www.dephan.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 May 2009.